

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui pembangunan dibidang ekonomi, namun sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan kesulitan besar terhadap perekonomian nasional terutama dunia usaha.

Awal tahun 1998 situasi perekonomian di Indonesia semakin memburuk. Situasi ini akan berdampak pada semakin banyaknya dunia usaha yang pailit sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor. Pailitnya debitor tentu akan menimbulkan masalah besar jika pranata hukum yang ada tidak lengkap dan sempurna, untuk itu perlu diperlukan pranata hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.²

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan

² Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1-2.

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Faillissement Verordening* Stb. Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* Tahun 1906 Nomor 348. Perpu No. 1 Tahun 1998 kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

UU No. 4 Tahun 1998 tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Revisi secara signifikan dilakukan terhadap UU No. 4 Tahun 1998 karena sarana untuk menyelesaikan utang sebagaimana yang diatur didalamnya dianggap tidak memenuhi kebutuhan dunia usaha yang semakin memburuk pada saat itu. Revisi terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang piutang. Selanjutnya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut juga diperlukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan tugas tertentu dibidang perniagaan termasuk dibidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran.

Kepailitan merupakan eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu penyertaan pailit maupun yang diperoleh selama proses kepailitan

berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.³ Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat lagi membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

UU Kepailitan pada dasarnya tidaklah semata-mata ditujukan untuk mempailitkan debitor yang tidak membayar utangnya, namun memberi alternatif lain selain kepailitan yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utangnya tapi masih memiliki prospek usaha yang baik secara kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya dan direstrukturisasi utang-utangnya serta disehatkan perusahaannya. Tindakan inilah yang sebaiknya terlebih dahulu ditempuh sebelum diajukan permohonan pailit, dengan kata lain kepailitan seyogyanya hanya merupakan *ultimum remedium*.⁴

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Pasal 1131 menjelaskan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala

³ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, (Yogyakarta: Seri Varia, 1996), hlm. 85.

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements Verordening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Grafiti, 2002), hlm. 59.

perikatannya perseorangan, sedangkan menurut Pasal 1132 kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal diatas adalah:⁵

1. apabila si debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds-gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. semua kreditor mempunyai hak yang sama; dan
3. tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan seseorang selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah

⁵ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1974), hlm. 7.

mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:⁶

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan; dan
2. *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

Dalam melaksanakan hak eksekusi kreditor khususnya pemegang Hak Tanggungan atas harta kekayaan debitor pailit, perlu memperhatikan hak preferen yang dimiliki oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan atas kebendaan milik debitor pailit. Pemegang hak preferen memperoleh hak mendahului atas kreditor lain untuk memperoleh pelunasan atas utang-utang debitor dengan cara menjual secara lelang kebendaan yang dijaminakan kepada kreditor tersebut secara preferen.

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai hak eksekusi kreditor preferen dalam hal debitor pailit yang menjelaskan, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sehingga kreditor

⁶ Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164.

preferen dapat segera mengeksekusi haknya atas kebendaan yang tidak dalam kuasa debitor pailit atau Kurator.

Kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor preferen atas kreditor lainnya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 menyebutkan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya Pasal 21 menyebutkan apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang. Dapat diartikan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 21 tidak membatasi adanya jangka waktu pemenuhan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi objeknya apabila debitor pailit. Obyek Hak Tanggungan tidak akan disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagi kepada para kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan sehingga memberikan penegasan mengenai kedudukan yang preferen bagi pemegang Hak Tanggungan terhadap para kreditor lain.

Adapun dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan, hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak

pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Mengenai waktu pelaksanaan eksekusi hak preferen oleh kreditor diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan. Pasal 59 ayat (1) menyatakan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat dua bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) juga telah menyebutkan, setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai sengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut, namun disisi lain Pasal 21 UU Hak Tanggungan telah menjamin kreditor yang memiliki hak jaminan atas kebendaan mempunyai hak separatis yaitu hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang Hak Jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan Hak Jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Kreditor berhak untuk melakukan eksekusi kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang

sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang Hak Jaminan untuk didahulukan dari para kreditor yang lainnya.⁷

Dahulu sebelum berlakunya UU Hak Tanggungan, praktek jaminan yang sering digunakan pada perbankan Indonesia adalah jaminan kebendaan yang meliputi:⁸

1. Hipotek, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1162 KUH Perdata;
2. *Credietverband*, yaitu jaminan atas tanah berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 6 Juli 1908 No. 50 (Stb.1908 No.542); dan
3. Fiducia (*fiduciare eigendomsoverdracht*), yaitu pemindahan milik secara kepercayaan.

Lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Berlakunya UU Hak Tanggungan berdampak pada hipotek yang diatur oleh KUH Perdata dan *credietverband* yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang sudah tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Pengikatan objek jaminan utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan.

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam

⁷ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hlm. 91.

memanfaatkan jaminan kredit. Apabila didalam hubungan perutangan debitor tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila utang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitor yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditor itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitor, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi utang debitor.⁹

Pelaksanaan pemenuhan hak kreditor terhadap benda-benda tertentu yang dijaminakan oleh debitor dilakukan dengan cara melalui eksekusi benda jaminan, oleh karena itu kreditor harus mempunyai alas hak untuk melaksanakan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial. Syarat adanya titel eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi kreditor terhadap perbuatan yang melampaui batas dari debitor. Titel eksekutorial dapat timbul berdasarkan putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial yang memutuskan bahwa debitor harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu, atau dapat juga berdasarkan akta Notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial berupa grosse akta. Menurut ketentuan undang-undang, grosse dari akta Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial, pada akta ini dimuat pernyataan pengakuan utang sejumlah uang tertentu dari debitor kepada kreditor.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 34.

Meningkatnya pertumbuhan kehidupan dunia bisnis dan industri menuntut segala sesuatu yang cepat dan praktis tetapi mempunyai kekuatan hukum yang kuat, termasuk dalam segi utang piutang, oleh karena itu, kesepakatan mengenai utang piutang tidak hanya cukup dituangkan didalam perjanjian tertulis tetapi perlu dituangkan dalam sebuah grosse akta pengakuan utang. Maksud dituangkan didalam grosse akta pengakuan utang adalah apabila debitor wanprestasi maka kreditor hanya tinggal mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi harta kekayaan debitor berdasarkan grosse akta pengakuan utang kepada Pengadilan Niaga dan bukan mengajukan gugatan untuk memperoleh pemenuhan atas piutangnya tersebut. Biasanya ketika meminjamkan uangnya, kreditor menginginkan adanya jaminan untuk mendapatkan kembali pemenuhan piutangnya, sehingga dalam praktek sering diadakan grosse akta pengakuan utang yang dibuat didepan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan oleh pihak kreditor untuk menagih piutangnya manakala pihak debitor lalai membayar utangnya. Grosse akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum didalamnya, kecuali ada bukti lawan.¹⁰

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 89.

Hal tersebut dimungkinkan karena didalam grosse akta pengakuan utang tersebut, oleh Notaris dibuat dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan adanya kata-kata tersebut maka grosse akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan kepailitan, UU Kepailitan diperlukan untuk :¹¹

1. menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor;
2. menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitor atau kreditor lainnya;
3. menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri, misalnya saja debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya kepada para kreditor.

Asas-asas yang terkandung dalam kepailitan sebagaimana yang disebutkan dalam UU Kepailitan:

1. Asas Keseimbangan

¹¹ Jono, *op. cit.*, hlm. 3.

Mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Kepailitan

Mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Menanggapi keberadaan ketentuan Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, maka dapat dikatakan bahwa pada

prinsipnya kedua pasal tersebut sama-sama memberikan jaminan bagi kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi haknya dan yang harus diperhatikan dalam menentukan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus-kasus kepailitan, Hakim Pengadilan Niaga berpedoman pada asas hukum yang berlaku.

Mengenai adanya ketentuan yang berbeda dalam UU Kepailitan, khususnya ketentuan Pasal 55 dengan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 sering dianggap tidak memperhatikan kepentingan kreditor pemegang Hak Tanggungan yang sebenarnya tidak demikian karena UU Kepailitan sendiri sangat memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan, baik debitor maupun kreditor. Hal ini akan dipertegas dalam bab pembahasan.

Dalam kaitanya dengan putusan pailit oleh Mahkamah Agung terhadap PT. Nusantara Ragawisata (termohon pailit) yang berperkara dengan UD. Alrindo (pemohon pailit), kasus posisinya diawali dengan adanya hubungan jual beli antara UD. Alrindo sebagai penjual bahan perlengkapan mesin pendingin dan PT. Nusantara Ragawisata sebagai pembeli. Transaksi jual beli antara pemohon dan termohon terjadi selama periode Juli 2003 sampai dengan Mei 2004 dengan seluruh tagihan sebesar Rp. 194.213.175,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah). Dalam transaksi tersebut

disepakati bahwa pembayaran dalam jangka waktu satu bulan setelah barang diterima oleh termohon.

Seiring berjalannya waktu, debitor tidak memenuhi kewajibannya walaupun telah diberikan peringatan oleh pemohon, sehingga pihak pemohon mengajukan permohonan pailit atas termohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam persidangan pihak termohon menolak bahwa ia mengakui adanya utang (pengakuan utang) dan yang ia lakukan hanyalah melakukan pembayaran utang kepada pemohon. Termohon juga menolak bahwa ia memiliki utang kepada CV. Sumber Bahagia dan CV. Suryamas Lumisindo.

Kasus antara UD. Alrindo dan PT. Nusantara Ragawisata, majelis hakim yang memutus dan mengadili perkara tersebut, baik dalam tingkat Pengadilan Niaga ataupun kasasi di Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT. Nusantara Ragawisata pailit beserta segala akibat hukumnya. Analisis lebih lanjut mengenai putusan Mahkamah Agung ini akan di jelaskan dalam bab pembahasan.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis memutuskan untuk memilih judul **AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITOR TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (ANALISIS PUTUSAN PAILIT MAHKAMAH NOMOR 018/K/N/ /2007).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yakni:

1. Bagaimanakah akibat hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal adanya pengaturan yang berbeda?
3. Bagaimanakah analisis putusan pernyataan pailit dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung No. 018/K/N/ /2007 terhadap PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang berperkara dengan UD. ALRINDO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan permasalahan yang telah disebutkan diatas maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan.
2. Mengkaji dan menganalisis penyelesaian yang dapat ditempuh dalam oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal adanya pengaturan yang berbeda.

3. Mengkaji dan menganalisis putusan pernyataan pailit dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung No. 018/K/N/ /2007 terhadap PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang berperkara dengan UD. ALRINDO.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dan manfaat penulisan merupakan satu rangkaian yang ingin dicapai bersama, dengan demikian penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis-teoritis, penulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akibat hukum putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan.
2. Secara sosial-praktis, adalah memberikan sumbangan pemikiran terhadap mahasiswa-mahasiswa atau praktisi-praktisi hukum untuk mengetahui tentang kepailitan apabila dihubungkan dengan kreditor pemegang Hak Tanggungan yang diketahui mempunyai hak yang diutamakan didalam menguasai objek Hak Tanggungan yang dijaminakan oleh debitor.

E. Kerangka Pemikiran

Teori merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berhubungan yang dikemukakan untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu.¹² Fungsi teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses terjadi.¹³ Suatu teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁴ Artinya kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis¹⁵, yang akan dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam penulisan tesis ini.

Menanggapi keberadaan ketentuan Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya kedua pasal tersebut sama-sama memberikan jaminan bagi kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi haknya, oleh karena itu ada tiga jenis unsur-unsur keadilan menurut John Finnis dan John Rawls yang berkaitan dengan asas keadilan, baik bagi debitor maupun kreditor. John Finnis menyebutkan:¹⁶

¹² J.J.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, dialihbahasakan oleh Arif Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 2.

¹³ J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, edt.M.Hisyam, (Jakarta: FE UI, 1996), hlm. 203.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 16

¹⁵ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, "Panorama Teori Hukum dan Keadilan", http://psp.ugm.ac.id/kks/materi_kuliah/1011%20Januari%202009/Panorama%20Teori%20Hukum%20dan%20Keadilan.ppt. tanggal 18 Oktober 2010, hlm. 1.

1. Keterkaitan dengan pihak lain (hubungan antar orang);
2. Adanya kewajiban (*duty*) pada seseorang untuk memenuhi hak pihak lain; dan
3. Kesetaraan (*equility*).

Sedangkan menurut John Rawls ada tiga bentuk konsepsi keadilan menurut teori keadilan (*A Theory of Justice*), yakni:¹⁷

1. Maksimalisasi Kebebasan (*Maximisation of Liberty*)
Kebebasan hanya tunduk pada pembatasan yang dimaksud untuk melindungi kebebasan itu sendiri.
2. Kesetaraan untuk semua (*Equality for all*)
Dalam hal kebebasan dalam kehidupan sosial dan dalam distribusi (pembagian) sumber daya sosial (*social goods*), hanya tunduk pada pengecualian bahwa ketidaksetaraan dibolehkan jika hal itu menghasilkan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat.
3. Kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran.

Dalam pelaksanaan kebajikan keadilan, maka keadilan itu selalu menjangkau hubungan-hubungan sosial, sebab pada pelaksanaan kebajikan ini harus selalu melibatkan lebih dari dua orang. Tambahan pula relasi pada orang-orang itu harus bersifat memisahkan (*afstandelijk*). Kebajikan ini justru berkenaan dengan relasi dengan orang lain sebagai yang lain. Dalam relasi-relasi yang lebih pribadi atau intim, kebajikan-kebajikan lain memainkan peranan. Kebajikan dari yang adil adalah menemukan keseimbangan (kesetimbangan), yang dengan itu justru

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

sebagai yang lain memperoleh apa yang menjadi haknya.¹⁸ Dengan demikian teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan sebagaimana yang telah disebutkan diatas oleh John Rawls dan John Rawls.

Prinsipnya, keadaan pailit terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu debitor dan kreditor, dalam hal ini debitor tidak mampu memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Adapun asas-asas yang terdapat pada suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata:

1. Azas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3):

“Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

2. Azas Keadilan

Pasal 1339:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”¹⁹

Dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasar keadilan dan kepatutan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 67.

Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat-akibat yang terjadi, dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian (kesepakatan). Itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H. R. dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Vollmar, 1952:255). Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advices*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*partij beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.²⁰

Pengaturan masalah kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyebutkan:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 67-68.

Pasal 1131

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang takbergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Pasal 1132

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang megutangkan padanya; pendapatan penjualan benda² itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing², kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan² yang sah untuk didahulukan.”

Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal diatas adalah, bahwa:²¹

1. apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds-gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. semua kreditor mempunyai hak yang sama; dan
3. tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

²¹ Kartono, *op. cit.*, hlm. 7.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikataan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:

- *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
- *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.²²

UU Kepailitan lahir guna mengatur mengenai cara menentukan eksistensi suatu utang debitor kepada kreditor, berapa jumlahnya yang pasti termasuk mengupayakan perdamaian yang dapat ditempuh oleh debitor kepada para kreditornya.²³ Selain itu, tujuan lahirnya UU Kepailitan sebagaimana yang tertuang didalam Penjelasan UU Kepailitan, yaitu:

²² Kartini Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 3.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 13.

1. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menegih piutangnya dari debitor;
2. untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya; dan
3. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Dalam pelaksanaan putusan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, semua pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara kepailitan tersebut wajib menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Niaga yang telah mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan para pihak dengan berdasarkan pada Teori Kesetaraan.

Ada kalanya putusan pailit tersebut dianggap tidak memenuhi Teori Kesetaraan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagaimana mestinya. Kreditor pemegang Hak Tanggungan selalu merasa dirugikan akibat adanya putusan pailit yang dianggap sudah memenuhi hak-hak dan kepentingan seluruh kreditor yang terkait, sehingga dalam prakteknya, debitor pailit yang memiliki utang dengan penjaminan objek Hak Tanggungan selalu mendapatkan kompensasi atau keringanan dari kreditor pemegang Hak Tanggungan yang bersangkutan. Keringanan yang diberikan dapat berupa pembaharuan perjanjian kredit atau novasi yang dalam praktek sering disebut restrukturisasi utang memungkinkan kreditor yang bersangkutan melakukan penghapusan bunga, denda kredit dan atau utang lainnya yang berkaitan dengan pinjaman pokok. Kreditor

pemegang Hak Tanggungan seringkali mengakomodir dibuatnya perjanjian restrukturisasi utang guna mengefisienkan penyelesaian utang-piutang mereka. Adapun alasan lain diupayakannya novasi adalah untuk menghemat biaya dan waktu pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang pada akhir pelaksanaannya belum tentu memberikan hasil yang maksimal, oleh karenanya, untuk mencapai tujuan pelaksanaan peradilan yang bisa mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak, para pihak yang terkait dalam perkara kepailitan harus memperhatikan asas-asas yang diadopsi oleh hukum kepailitan.

Beberapa asas dalam hukum kepailitan yang penting dalam penulisan tesis ini antara lain:

1. Asas Keseimbangan

UU Kepailitan memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam UU Kepailitan terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. UU Kepailitan tidak semata-mata bermuara pada kepailitan dan tindakan eksekusi aset debitor, terdapat alternatif lain yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utangnya namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan pengurusnya beritikad baik secara kooperatif untuk melunasi utang-utangnya, maka dapat diupayakan restrukturisasi atas utang-utangnya dan penyehatan kembali perusahaannya, sehingga kepailitan merupakan *ultimum remedium*.²⁴

3. Asas Keadilan

Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya tanpa

²⁴ *Ibid.*, hlm. 58-59.

memperhatikan kepentingan kreditor lainnya dan kepentingan debitor, misalnya dengan penagihan yang sewenang-wenang, bagaimana kelangsungan usaha debitor dan bagaimana pelunasan terhadap kreditor yang lain.

4. Asas putusan yang didasarkan pada persetujuan kreditor mayoritas²⁵
Permohonan pernyataan pailit yang hanya diajukan oleh kreditor minoritas dan tidak disetujui oleh kreditor mayoritas, tidak akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sebab pengabulannya akan membawa kerugian bagi kreditor mayoritas. Demikian pula rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya akan dikabulkan apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui yang hadir pada rapat kreditor yang jumlah tagihannya mewakili $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah tagihan dari kreditor yang hadir pada rapat.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.²⁷ Dalam mengidentifikasi masalah yang ada, metode ini bersandar pada prinsip-prinsip, teori dan asas-asas hukum yang berlaku untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai akibat hukum putusan pernyataan pailit debitor bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan.

²⁵ *Ibid.*, hal. 48.

²⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 22-23.

²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan penelitian yang terdiri dari : a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; b. Penelitian terhadap sistematika hukum; c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; d. Penelitian sejarah hukum dan e. Penelitian perbandingan hukum. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif²⁸ analitis dengan sumber kepustakaan untuk menjawab permasalahan dan menggunakan logika berpikir yang ditempuh melalui penalaran induktif, deduktif dan sistematis dalam penguraiannya, untuk menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan.

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis kemudian mengorganisasikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai akibat hukum putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor penerima Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggambaran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang akan dikumpulkan berasal dari data sekunder. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

²⁸ Deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 3.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
 - 6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 8) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer berupa tulisan/buku berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Kepailitan dan Hukum Jaminan khususnya Hak Tanggungan.
- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, berbagai majalah hukum yang berkaitan dengan masalah kepailitan serta lembaga Hak Tanggungan, kamus

hukum, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang objektif, maka didalam penelitian ini penulis melakukannya sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu dengan menggunakan buku literatur dan bahan kuliah yang mengacu pada teori-teori, pendapat para ahli, dan membaca dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah bersifat normatif kualitatif karena penulis bertolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Artinya data yang diperoleh disusun secara lengkap, sistematis, benar dan konsisten yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai masalah yang akan dibahas secara mendalam dan hasilnya berupa tesis.

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisa dan diseleksi, data mana yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 55.

Setelah dianalisis dan diseleksi kemudian dilakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan untuk mencapai kejelasan yang dimaksud dan selanjutnya hasilnya dilaporkan dalam bentuk tesis.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah memahami isi dari tesis ini, maka penulis menyajikan dalam bentuk rangkaian bab dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian tesis secara mandalam disertai teori-teori yang diperlukan menganalisa permasalahan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dibagi ke dalam enam Sub Bab yaitu Sub A Latar Belakang, Sub B Perumusan Masalah, Sub C Tujuan Penelitian, Sub D Manfaat Penelitian, Sub E Kerangka Pemikiran, Sub F Metode Penelitian dan Sub G Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dibagi ke dalam dua Sub Bab yaitu Sub A Kepailitan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Sub B Akibat Kepailitan Secara Umum, Sub C Hak Tanggungan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tiga Sub Bab yaitu Sub A Akibat Hukum Ditetapkannya Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan, Sub B Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Adanya Pengaturan Yang Berbeda, Sub C Analisis Putusan Pernyataan Pailit Di Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung Nomor 018/K/N/ /2007 Terhadap PT. NUSANTARA RAGAWISATA Yang Berperkara Dengan UD. ALRINDO.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya mengenai “Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Analisis Putusan Pailit Mahkamah Agung Nomor 018/K/N/ /2007) yang akan memuat kesimpulan dan saran”.